BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Pada bab ini penelitian ini akan menganalisis mengenai implementasi pelaporanf akuntansi paroki di Keuskupan Agung Semarang, pembahasan di mulai dengan struktur sebagai berikut : penelitian akan membahas mengenai deskripsi objek penelitian, pembahasan mengenai *Good Church Governance*, Pembahasan Teori Institusional Isomorfisma, Proses inisiasi, Proses berjalannya, Proses implementasi, Temuan dari peneliti.

4.2. Deskripsi Objek Penelitian

Keuskupan merupakan metropolit provinsi gerejani dalam kesatuan tiga keuskupan yang berada di dekatnya seperti keuskupan malang, keuskupan Surabaya, dan Keuskupan Purwokerto. Keuskupan Agung Semarang memiliki 504.000 umat katolik dalam wilayah yang memiliki luas 21.200 km2. Keuskupan Agung Semarang sendiri berada di Jawa Tengah lebih tepatnya berada di Jalan Pandanaran 13, Randusari, Semarang Selatan, Semarang, 50244. Keuskupan didirikan pada 25 Juni 1940 sebagai Vikariat Apostolik Semarang, tetapi ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung Semarang pada 3 Januari 1961. Keuskupan Agung Semarang memiliki 4 kevikepan yang tersebar di : Kevikepan Kedu, Kevikepan Semarang,

Kevikepan Surakarta, dan Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta, masing – masing kevikepan juga memiliki jumlah paroki yang berbeda. Kevikepan Kedu 10 paroki, Kevikepan Surakarta 28 Paroki, Kevikepan Semarang 29 Paroki, Kevikepan DIY 36 Paroki (Sumber dari Kas.ac.id). Keuskupan Agung Semarang bersama paroki – paroki juga mempunyai semangat untuk menjaga harta bendanya ingin memiliki tata kelola yang baik, hal tersebut dimulai dengan adanya surat keputusan uskup pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa gereja harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjaga itu.

> *"Dasarnya memang keputusan Mgr. Haryo pada tahun 2002, yang memerintahkan supaya semua paroki menetapkan dasarnya PSAK 45 yang dipakai untuk organisasi nirlaba"*(interviewee 6 – Romo Ekonomat)

Sebelum tahun 2002 itu pelaporan akuntansi gereja belum memiliki pola yang terstruktur, masih menggunakan laporan keuangan tetapi manual, dan belum ada yang memperkenalkan pelaporan akuntansi paroki pada waktu itu. Pada Tahun 2002 dikeluarkan Surat Keputusan Uskup yang mewajibkan semua Paroki untuk membuat Pelaporan Akuntansi yang baik. Pelaporan akuntansi paroki tersebut di gunakan untuk menjaga harta benda supaya lebih aman, lebih tertata, dan bisa lebih terstruktur. Pelaporan akuntansi pertama kali di perkenalkan kepada paroki – paroki dengan cara inisiasi.

4.3. *Good Church Governance*

Tata kelola yang baik merupakan kebutuhan setiap organisasi termasuk gereja, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) mengatur mengenai perlunya tata kelola yang baik bagi organisasi. Gereja dalam hal ini mengadopsi dalam bentuk *Good Church Governance* yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan. penerapan *Good Church Governance* dikarenakan Tata Kelola Gereja atau Paroki sendiri tidak ada sanksi atau hukuman yang membuat orang – orang yang bekerja di dalamnya memiliki efek jera. *Good Church Governance* dibutuhkan gereja untuk meningkatkan tata kelola yang baik dan untuk mempertanggung jawabkan dana umat yang terkumpul melalui persembahan. Gereja atau paroki memiliki berbagai kelemahan antara lain : tidak adanya perincian, sulit mengetahui berapa jumlah aset, maka dari itu menurut peneliti *Good Church Governance* sangat perlu untuk diterapkan oleh setiap paroki.

Good Church Governance merupakan adopsi dari *Good Corporate Governance*, yang memiliki banyak definisi : menurut Bank Dunia adalah aturan,standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perinc ian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor. KNKCG yang memberikan pedoman tata kelola organisasi yang baik mempunyai indikator untuk mengimplementasikan GCG. Indikatornya

antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi,dankewajaran.(Ferial et al., 2016)

Transparansi adalah keterbukaan dalam menjalankan kegiatan atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi. Informasi yang di sampaikan harus material dan relevan supaya dapat membantu atasan dalam mengambil keputusan. Selain itu transparansi wajib menjamin adanya pengungkapan tepat waktu dan akurat. Sangat penting bagi paroki – paroki untuk melakukan transparansi ini supaya setiap umat yang melakukan ibadah di paroki kita bisa percaya dengan pelaporan keuangan yang kita sajikan setiap minggunya.

Transparansi selain memang di butuhkan oleh umat supaya bisa melihat apa saja pengeluaran dan pendapatan, transparansi diperlukan karena gereja itu perlu mempertanggung jawabkan uang persembahan dari umat supaya transparan.

> *" Ketika saya menjelaskan konsep transparansi, pentingnya apa, ini bukan semata - mata taat keuskupan, kita itu ngelola duit umat, jadi kan pengelolaan uang jadi tanggung jawab kita terhadap umat lebih ke transparansi."* (Interviewee 8 -- Bendahara Paroki)

Akuntabilitas adalah suatu konsep yang mnejelaskan mengenai Pertanggung jawaban, jika lembaga profit harus melakukan Akuntabilitas terhadap *Stakeholder* atau pemegang saham sehingga pengelolaan perusahaan terlakasana secara efektif. Paroki juga harus melakukan Pertanggung jawaban terhadap Jemaatnya, supaya tata kelola paroki bisa

lebih terlaksana secara efektif. Akuntabilitas harus dimiliki oleh suatu Paroki karena harus mempertanggung jawabkan semuanya selain kepada jemaat juga kepada Keuskupan. Setiap paroki yang ada harus melakukan akuntabilitas dengan baik dan bertanggung jawab kepada umat serta tata kelola paroki itu sendiri.

> " *Lalu dalam perjalanan, paroki - paroki gereja bergumul dengan semua itu, tidak mudah. Tapi, lama - lama terbentuk bahwa kalau kita mengelola harta benda itu harus transparan, akuntabel. Yang penting mindsetnya, mengubah, ya kalau menerima ya dicatat, dicatat secara benar, menurut infensi/intensinya, mengeluarkan bon ada intensinya,maka penting ada namanya budgeting program (pengeluaran investasi/dll).*" (Interviewee 3 -- Romo Keuskupan)

Responsibility atau Tanggung Jawab, paroki mempunyai salah satu tanggung jawab dalam melakukan pelaporan akuntansi ini yaitu mempertanggung jawabkan uang umat. Paroki wajib membuat laporan keuangan ini, Supaya umat juga bisa melihat berapa saja dana yang masuk ke dalam paroki, atau paroki memang sedang kekurangan dana. Jadi paroki harus mepunyai rasa tanggung jawab supaya melakukan pelaporan akuntansi. Tanggung jawab paroki mengenai uang umat sangat diperlukan supaya tata kelola paroki lebih tertata dengan baik.

> " *Dari yang sama sekali tidak ada, tapi langsung arah transaparansi, mungkin mereka sebenarnya bisa menerima arah transapransi, melaporkan duit umat itu OK, tapi akuntansi*" (interviewee 8 -- bendahara paroki)

Independensi memiliki arti bahwa keadaan dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun atau entitas manapun, artinya kita bisa melakukan tindakan apa saja sesuai dengan prosedur atau dalam

mengambil keputusan kita tidak ada yang mempengaruhi. Paroki juga wajib melakukan independensi supaya *Good Church Governance* dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaporan keuangan jika ada yang mempengaruhi pasti hasilnya juga akan berbeda dengan yang tidak di pengaruhi.

> " *Kita harus punya self control, lebih bagus. Sehingga kita harus bergerak, supaya paroki akuntabel, independen, terkontrol, dan bisa diprediksi*" (Interviewee 3 -- Romo Keuskupan)

Kewajaran, dalam menjalankan tugas – tugas yang sudah ada Paroki harus bisa memperhatikan umat yang beribadah dengan adil. Pengambilan keputusan yang dilakukan paroki bisa dilakukan secara terbuka dan umat yang beribadah mengetahui keputusan yang dibuat, selain itu dalam menjalankan keputusan itu umat yang beribadah juga bisa memberikan masukan supaya *Good Church Governance* dapat berjalan dengan baik.

4.4. Inisiasi Sistem

Inisiasi merupakan proses bagaimana pelaporan akuntansi yang baik didengungkan oleh KAS dimulai oleh proses pelaporan akuntansi yang baik mulai didengungkan. Pada awalnya sebelum adanya pelaporan akuntansi, paroki – paroki sudah diwajibkan membuat laporan keuangan tetapi di buat secara manual. Di dalam membuat laporan keuangan ini sendiri Bendahara hanya diminta untuk mencatatat pendapatan dan mencatat pengeluaran yang ada di dalam siklus keuangan paroki. Pada awalnya hanya menggunakan

laporan aktivitas (penerimaan dan pengeluaran) berbasis kas. Sistem pencatatannya juga masih secara manual.

Pemerintah mengeluarkan UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam UU tentang yayasan ini menyebutkan bahwa pengurus wajib menyusun laporan tahunan sekurang – kurangnya memuat :

1. Laporan Keuangan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku serta hasil yang telah di capai
2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir perioda, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Tahun 2002 menjadi awal mula gagasan untuk menjalankan pelaporan keuangan yang baik bagi paroki. Tahun 2002 Uskup mengeluarkan surat perintah tentang pelaporan keuangan yang mewajibkan semua paroki – paroki membuat laporan keuangan. Surat perintah ini menjadi cikal bakal orang – orang yang bekerja supaya memiliki semangat untuk menjaga keuangan paroki, dan sadar pentingnya transparan serta kredibel. Pada saat ini semangat untuk menjaga harta benda menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan pelaporan akuntansi ini.

Semangat menjaga Harta benda gereja yang mendasari bahwa penting membuat pelaporan keuangan yang berstandar akuntansi. Yang dulu awalnya paroki – paroki hanya membuat pelaporan keuangan hanya melakukan *cash basis* uang masuk dan uang keluar. Paroki yang sekarang menggunakan berbasis komputer dan menggunakan pelaporan keuangan

berstandar akuntansi. Jadi awalnya Keuskupan. Keuskupan awalnya melakukan perubahan konsep pelaporan supaya memiliki standar akuntansi dan untuk mempermudah proses akuntansi ini digunakan *software* untuk membantu paroki – paroki.

> " *supaya gereja makin kredibel. Salah satu aspek nya, adalah tata kelola harta benda/keuangan gereja, baik paroki maupun lembaga-lembaga.Jadi mengikuti pedoman - pedoman standar yang berlaku di negara ini, peraturan pajak, peraturan lain yang terkait supaya kredibel. Tidak hanya secara internal, secara eksternal juga bisa nanti jika diminta mempertanggungjawabkan*" (Interviewee 3 -- Romo Ekonomat)

Pada awalnya umat tidak memahami pentingnya proses pelaporan akuntansi yang baik. Romo sudah mendengungkan bahwa kita harus menjaga harta benda gereja, tetapi pada saat itu belum ada aturan dan pedoman untuk melakukan pencatatan dan pelaporan gereja berbasis akuntansi. Pelaporan akuntansi yang baik juga merupakan sarana untuk spriritualistasnya semangat pelayanan, karena harta ini adalah harta Tuhan. Harta yang di titipkan kepada paroki – paroki yang ada, dan karena itu kita adalah pengelola kita juga harus menjaga harta benda ini dengan baik. Semangat pelayanan demi memberitakan karya injil ini, romo yang ada memberikan semangat itu terus – menerus supaya orang – orang yang bekerja di paroki menjadi terbuka akan pentingnya pelaporan akuntansi.

> *" SIstem akuntansi ada spiritualitasnya semangat pelayanan. Harta ini adalah harta Tuhan yang dititipkan sebagai ahli waris orang miskin. Nilai injilnya dimasukkan. Karena itu, kita adalah pengelola, pengelola yang diminta mengelola dengan baik harta ini. Semangat pelayanan demi tujuan pemberitaan karya injil ini. Jadi itu merupakan sarana atau alat semangatnya pelayanan. Secara moral, sama. Tetapi saat*

> *masuk soal Tata kelola harta bendanya, kita tambahkan ilmu positif dengan ditunjukkan istilah transparan. Bahasa profane transparan akuntabel. Kata jujur kalua dalam akuntansi transparan akuntabel. Terbuka, terlihat, dan tertelusur. Bahasa moral kita lakukan dengan jujur, sungguh-sungguh.”* (Interviewee 3 -- Romo Keuskupan)

Gereja bertumbuh dan berkembang bersama umat. Sumbangan dana dari umat merupakan bukti kontribusi umat terhadap kemajuan gereja. Selain itu, hal tersebut merupakan sarana bagi umat untuk mempunyai rasa memiliki terhadap gereja. Mengapa dalam menjalankan sistem akuntansi menjadi penting bagi paroki jika yang manual sudah bisa di lakukan, karena paroki – paroki bisa berjalan itu karena ada dana yang di berikan dari umat setiap minggunya serta adanya PSAK 45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan nirlaba.

> “ *Karena memang kita lahir dananya juga dari sumbangan dan kemurahan hati banyak orang, maka harus makin kredibel. Salah satunya adalah pokok-pokok keuangan adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas.*” (Interviewee 3 -- Romo Keuskupan)

4.5. Proses perkenalan

Surat keputusan uskup pada tahun 2002 menjadi dasar proses pelaporan keuangan paroki di lakukan. Setelah proses pelaporan keuangan paroki sudah di dengungkan selanjutnya adalah proses perkenalan sistem ke paroki – paroki. Dari bagaimana sistem itu berjalan, apa saja yang di butuhkan, memberikan pedoman bagi orang – orang yang bekerja di paroki untuk membuat laporan keuangan berbasiss sistem.

Pada saat sosialisasi sistem akuntansi paroki, terdapat beberapa kelemahan sehingga perlu dilakukan beberapa revisi baik dari sisi prosedur akuntansi maupun sistem. Keuskupan menyusun buku pedoman yang dikenal sebagai buku Petunjuk Teknis Keuangan Akuntansi Paroki. Sistem pelaporan keuangan ini berjalan awalnya karena ada sosialisasi awal. Ada 1 buku yang menjadi pedoman, buku ini disosialisasikan kepada paroki – paroki yang ada. Buku yang ada berisikan kebijakan bagi kalian untuk mengelola harta benda, dan bagaimana cara mengelolanya.

> "*buku ini, merupakan berisi kebijakan bagi kalian untuk mengelola harta benda. Kemudian, ada sesi tertentu untuk bendahara dan karyawan paroki. Untuk pstor, lebih kuat penyampaian ke sisi kebijakan. Bendahara dan karyawan kebijakan disampaikan, tapi ditmbahi pengetahuan teknis (kode akun, contoh laporan neraca, laporan aktivitas*" (Interviewee 1 -- staff keuskupan)

PPAP pada awalnya dibentuk tahun 1991, di dalamnya berisi masih konsep pertanggungjawaban harta benda, PPAP belum berisikan pelaporan akuntansi. Setelah itu PPAP diturunkan pedoman teknisnya yaitu PTKAP yang diterbitkan pertama kali tahun 2008. Di dalam PTKAP ini sudah mengacu pada PSAK 45.

Tahun 2008 di buat buku merah PTKAP (Pedoman Teknis Keuangan Akuntansi Paroki). Banyak orang yang terlibat dalam pembuatan PTKAP ini yaitu Tim Akuntansi KAS, beberapa tokoh KAS, dan beberapa universitas katolik, yang terlibat dalam tim yaitu Universitas Sanata Dharma, ASMI Yogyakarta, dan Unika Soegijapranata. PTKAP di

susun karena gereja adalah lembaga 2 sisi, lembaga yang resmi secara gerejani, tetapi juga sebagai sipil. Di dalam gereja juga terdapat hukum – hukum yang berlaku di sipil jadi untuk menjembatani antara gereja dengan sipil di buatlah PTKAP.

> *"Tetapi, kalua sy melihat, psak tdk begitu saja diterapkan. Karena disesuaikan dengan situasi gereja, karena gereja sebagai lembaga dua sisi, lembaga yg secara resmi gerejani, tpi juga sipil. Terdpaat hukum2 yg berlku di sipil, tdk smuanya klop dgn kehidupan spiritualitas gereja. Lalu diolah disesuaikan supaya keberhasilannya seberapa, dirumuskan dlm ptkap."* (*Interviewee 7* – Romo Ekonom)

Buku ini berisikan pedoman harta benda gereja, di dalam PTKAP ini di jelaskan juga aturan bagaimana memperolehnya, dan pedoman bagi paroki. Di dalam PTKAP juga terdapat prosedur penerimaan kas, pembelian aset. Setelah PTKAP di buat maka diperlukan untuk megimplemetnasikan PTKAP. PTKAP jika ingin berjalan maka dibutuhkan *software* akuntansi. Dalam perjalanannya tim yang ada menyadari bahwa tidak semua paroki memiliki kemampuan untuk mengoperasikan akuntansi, walaupun hanya akuntansi sederhana seperti memposting jurnal, input jurnal. Tahun 2008, tim yang di bentuk mengusulkan software bernama GL paroki, lalu pihak Keuskupan menyetujui akan membeli software GL kemudian di setting akun-akunnya sesuai dengan PTKAP, untuk mempermudah paroki dalam menginput.

> *" pendampingan, dulu Roadshow dari Vikep di tempat – tempat, berminggu - minggu Roadshow untuk pelatihan. Kemudian pelatihannya, lebih kearah teknis ya, tapi sebelum itu, awal-awal pertama kali kita harus memperkenalkan betul ya, mengubah dari orang tidak sadar paroki,romo, bendaharanya, blm ada ksadaran untuk menyusun Laporan*

> *Keuangan, tiba - tiba dipaksa bikin Laporan Keuangan dengan standart akuntansi PSAK 45.* (Interviewee 8 -- Bendahara Paroki)

Tahun 2008 saat GL Paroki sudah disiapkan sesuai PTKAP Keuskupan dan tim memberikan sosialisasi mengenai tata kelola keuangan. Harapan Keuskupan sendiri paroki semakin sadar akan pentingnya pelaporan keuangan berbasis akuntansi ini, dan peduli dengan ini. Sosialisasi dibagi menjadi 3 sesi.

Sesi pertama kepada Romo Kepala dalam sosialisasi pertama ini hanya di fokuskan untuk mengubah *mindset* dan sudut pandang pada pertama ini ada 2 kubu yang terlibat romo yang muda dan romo yang lama. Romo yang muda lebih ke arah *open mind* bahwa ini penting untuk paroki sedangkan romo yang lama lebih ke *close mind* untuk apa membuat pelaporan akutnansi hanya menyusahkan saja.

> " *Kalo romo muda, sudah lebih terbuka, lalu untuk belajar sesuatu yang baru itu mungkin merasa mampu mengikuti dengan benar, selain konsep dasarnya apa tujuannya apa, lebih ke akuntansi*." (Interviewee 8 -- Bendahara paroki)

Sesi kedua pelatihan di laksanakan kepada pastor pembantu dan bendahara. Pastor pembantu vikarisnya berkumpul dengan bendahara dalam pelaksanaan sesi kedua ini. Berbeda dengan sosialisasi sesi pertama, yang ini lebih terbuka dan menerima pembelajaran hal baru jadi tidak ada perdebatan dan lebih ke *opeen mind*.

> *"Saya mengalami ktika pelatihan, kita diawal2 dipisah. Bendahara dn stf admin,Romo kepala,Pastor kepala, pastor pembantu. Yg romo kepala dikumpulkan sendiri, nah nanti pastor pembantu vikarisnya kumpulnya sama bendahara. Lalu pelatihan berikutnya untuk staf kantor, jadi muatannya beda2."(Interviewee 9, bendahara paroki)*

Sesi ketiga dalam sosialisasi ini kepada staff kantor. Staff kantor di sini di sosialisasikan lebih ke arah bagaimana menggunakan *software* yang ada. Staff kantor memiliki tugas yaitu menginput data.

Pelatihan yang di berikan ke paroki – paroki walaupun sudah secara benar dan secara detail tetapi masih banyak paroki – paroki yang pada jamannya mengalami kesulitan dalam melakukannya. Supaya sistem akuntansi yang sudah di buat berjalan maka Keuskupan membuat peraturan bahwa paroki – paroki harus membuat laporan keuangan setiap bulan dan harus dikirimkan kepada Keuskupan. Dalam pengerjaannya banyak paroki yang tidak mengikuti peraturan yang ada dan tidak mengirimkan laporan keuangan setiap bulan kepada Keuskupan. Maka dari itu Keuskupan membuat tim yang disebut supervisi. Supervisi memiliki tugas untuk mengecek pekerjaan pelaporan keuangan paroki, dan supervisi memiliki tugas untuk membantu mereka dalam pembuatan laporan keuangan supaya tidak mengalami kendala.

> “ *Paroki membuat narasi 3 hal, tata penggembalaan, administrasi, dan harta benda, dalam bentuk buku isinya 3 itu. Kami mengirimkan form harta benda, ada form checklist terhadap apa yang sudah dilakukan di paroki lalu kami dating, kami wawancara berdasarkan checklist itu, dari bukti transaksi, laporan, dokumen. Lalu kami beri rekomendasi apa yang perlu di tindaklanjuti.biasanya kami menemukan, misalkan paroki a bagaimana dgn pelaporan, bgmn dgn setoran kolekte-kolekte khususnya, dari situ kami akan melakukan rekomendasi dan apresiasi jika menemukan prktek baik . surat keputusan ada, sop ada, sudah punya brankas sendiri, sudah puny computer sndiri,Rekomendasi untuk paroki yg plaporan msih terlambat, temuan - temuan apa yang kami menemukan tidak beres. Itu nanti, ketika kami evaluasi, disimpulkan apa saja permasalahan di paroki, kami sampaikan ke Keuskupan. Sebagai tindak lanjut, jika ada*

masukan - masukan seperti Perbaikan di sisi software"
(Interviewee 2 -- Staff Keuskupan)

Supervisi diadakan oleh Keuskupan untuk membantu paroki – paroki dalam menjalankan tugasnya. Keuskupan juga memberikan sanksi kepada paroki – paroki yang tidak melakukan laporan keuangan setiap bulannya. sanksinya lebih ke arah jika paroki – paroki membutuhkan subsidi dana dari Keuskupan. Itu tidak akan diberikan atau tidak akan cair jika paroki – paroki yang meminta tidak membuat laporan keuangan. Ini adalah langkah yang di ambil Keuskupan supaya sistem nya berjalan dengan lancar, dan bisa di bilang efektif.

" *Pertama dari Keuskuapn Agung Semarang mengadakan pelatihan pelatihan untuk bendahara karyawan yang mengerjakan ini, lalu dari Keuskupan Agung Semarang selalu membuat laporan meminta dari paroki paroki untuk melaporkan, dalam arti nagih ke paroki paroki, kalau sanksi khusus biasanya begini kalau biasanya paroki itu membutuhkan subsidi dari Keuskupan Agung Semarang, subsidi itu tidak diberikan kalau laporan keuangan itu belum beres, sehingga memacu paroki – paroki lebih rajin"*
(Interviewee 7 -- Romo Paroki)

Paroki – paroki yang melakukan pelaporan keuangan akuntansi juga mengalami perubahan – peruabahan *software* yang diberlakukan. *Software* yang ada terus dikembangkan supaya orang yang tidak memiliki Latar Belakang Akuntansi bisa mengoperasikannya. Dari yang sebelum adanya sistem pelaporan akuntansi paroki – paroki membuat laporan keuangan dengan cara manual. Seteleh ada sosialisasi paroki menggunakan software DOS namanya, seiring terbitnya buku paroki

menggunakan sistem GL. Dari GL lalu ada perbaharuan pindah ke Excel karena ada kompatibilitas sistem 32 bit terhadap Windows, dalam hal ini software Excel memiliki keterbatasan dan akhirnya pindah ke Acces. Tim yang ada waktu itu mendesain supaya sistem sangat membantu paroki – paroki yang ada, supaya paroki – paroki menjalankan sistem yang ada maka ada proses inisiasi.

4.6. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah penerapan bagaimana sistem itu berjalan, dan implementasi sistem ada pada Tahun 2008. Yang pada saat itu sudah di terbitkan PTKAP sebagai pedoman bagi paroki – paroki yang ada, selain dari menerbitkan PTKAP Keuskupan. Bersama tim memberikan pelatihan kepada paroki – paroki yang ada di wilayah cakupan Keuskupan, dan pelatihan – pelatihan yang ada meliputi Semarang, Yogyakarta, dan Solo.

> " *Awalnya bersama teman - teman dosen akuntansi sekitar tahun 2008 PTKAP merah, itu yang tadi diceritakan, kita memberikan materi pelatihan ke paroki, kalo dulu keliling - keliling, dari semarang, yogyakarta ,solo.*" (Interviewee 9 -- bendahara paroki).

Sistem *software* yang ada jika ada pembaruan sistem selalu dilakukan pelatihan – pelatihan lagi supaya tetap bisa di jalankan sistemnya bagi semua paroki. Contohnya saja perpindahan dari GL ke

Excel sistem ini berubah karena kompabilitas sistem 32 bit terhadap windows baru, dilakukan try out 2x, TOT sekali.

> " *Ada try out dua kali, kmudian TOT, dari proses itu ada masukan diperbaiki, kemarin udh fix terus dilakukan sosialisasi 2018.*" (Interviewee 8 -- Bendahara Paroki)

4.7. *Theory Institutional*

Teori institusional berfokus pada nilai-nilai dan kepercayaan yang diasumsikan dari kehidupan sosial dan organisasi. Kesesuaian organisasi dengan nilai-nilai dan kepercayaan ini memberikan jauh lebih banyak daripada manfaat teknis, melimpahkan atribut melegitimasi yang kuat, dengan demikian memberikan organisasi tersebut akses ke sumber daya (Irvine, 2008) dan memastikan kelangsungan hidup mereka dalam masyarakat yang semakin terorganisir dan saling terhubung.

Teori Institusional (Institusional Theory) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup. Organisasi publik yang cenderung fokus pada perolehan legitimasi maka bisa jadi akan memiliki kesamaan atau isomorfisme (isomorphism) dengan organisasi publik lainnya. Sumber (Irvine, 2008).

4.8. *Theory Institusional Isomorphism*

Teori isomorfisma adalah konsep inti dari institusional teori. Institusional teori membahas mengenai bagaimana terbentuknya kelembagaan, selain itu institusi bisa terbentuk karena adanya tekanan yang disebabkan oleh lingkungan. Teori ini menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan untuk tindakan tindakan individu ataupun tindakan untuk mengambil keputusan, sedangkan berbeda dengan institusional isomorfisma. Isomorfisma sendiri bisa diartikan sebagai proses yang mendukung satu unit kedalam populasi untuk menyerupai unit yang lainnya guna menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Berbeda dengan institusional teori yang menyatakan bahwa organisasi bisa berubah dengan adanya tekanan lingkungan. Teori isomorfisma mendefinisikan bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena adanya tekanan institusional. Baik dikarenakan adanya tekanan *koersif* (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (organisasi mengadopsi bentuk karena tuntutan seorang professional organisasi), dan mimetik (Organisasi meniru atau mengkopi organisasi lainnya). Dalam menjalankan teori isomorfisma ini sendiri seseorang bisa berubah karena adanya tekanan. (Wikke, 2018).

Proses Institusionalisasi

Institutional Isomorphism

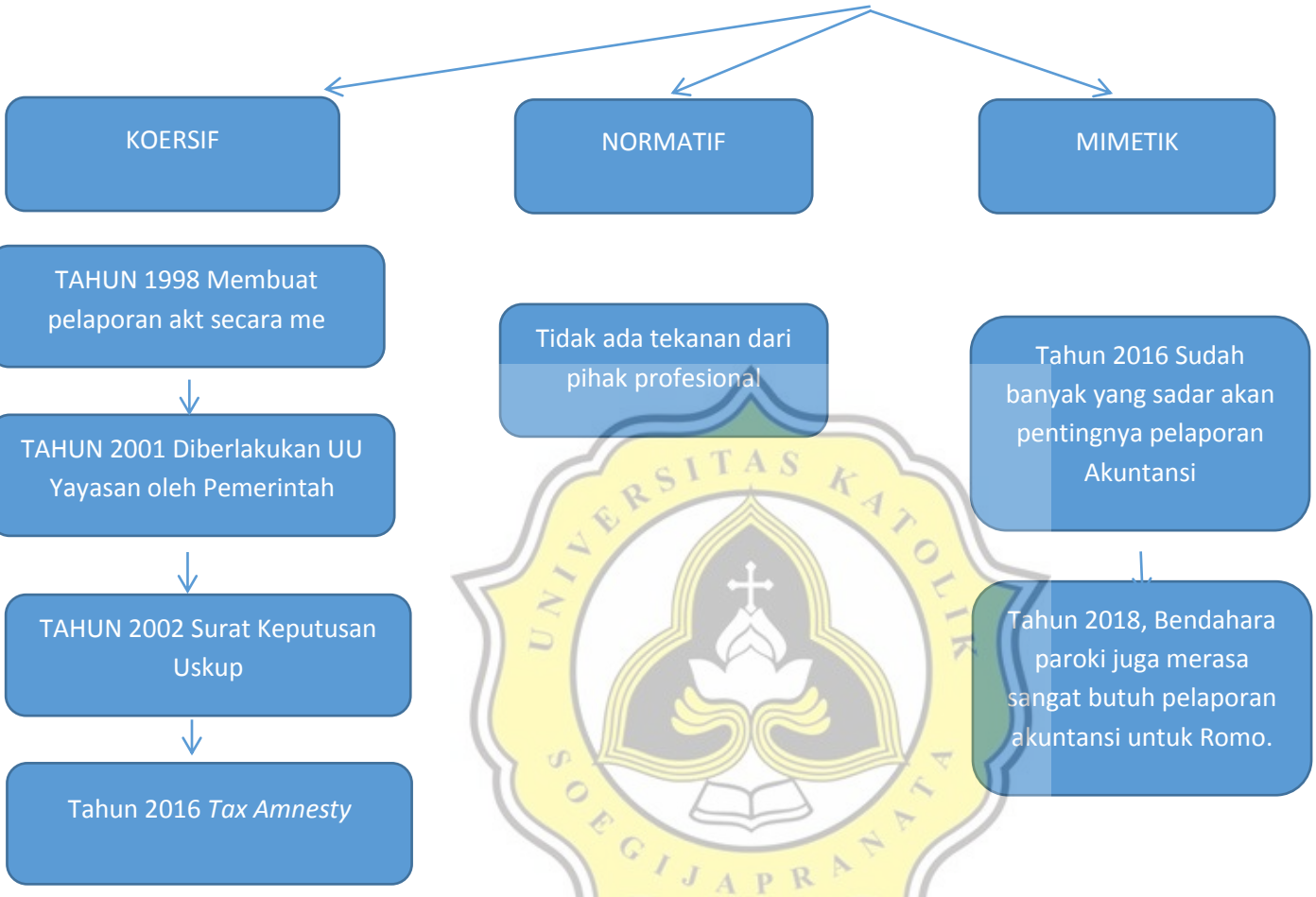

- Isomorfisma Koersif

Isomorfisma koersif merupakan tekanan yang di dapatkan oleh organisasi tetapi dalam bentuk eksternal, seperti yang di definisikan di atas bahwa isomorfisma koersif membuat organisasi harus patuh pada aturan untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi harus melakukan aturan itu dikarenakan adanya tekanan eksternal ini, selain itu isomorfisma koersif adalah salah satu indikator yang bisa mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Pihak Eksternal dalam Isomorfisma Koersif adalah

pihak yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah yang memberikan tekanan, atau otoritas pajak.

Penelitian mengenai Isomorfisma Koersif ini sendiri pernah di teliti oleh (Irvine, 2008) yang menulis artikel "*The global institutionalization of financial reporting: The case of the United Arab Emirates.*" Dalam penelitian Irvine menjelaskan bahwa dalam pelaporan keuangan studi kasus Uni Emirat Arab ini memiliki tekanan koersif dari Bank dunia dan Pasar Modal. Dikarenakan UEA sendiri memang sudah tergabung dengan Bank Dunia pada tahun 1972 jadi dia juga harus mengikuti Bank Dunia.

Implementasi sistem akuntansi paroki, awalnya umat – umat yang menjalankan pelaporan akuntansi juga ada yang resisten (tidak setuju) karena memang awalnya umat *close mind* tidak mau menerima tentang pentingnya pelaporan akuntansi.

> *"Resistensi sebenarnya bukan karena tidak mau ya, tetapi karena merasa kemampuan tdk cukup, maka yg ditempuh KAS adalah mengerahkan tim/petugas2 ke paroki mendampingi klp2 trttu missal di jogja bbrp paroki dikumpulkan, bagaimana dibuat pendampingan." (Interviewee 6 -- Romo ekonom)*

Hierarki gereja Katolik terdiri dari para Uskup, imam, dan deakon. Dalam esensi eklesiologi dari istilah tersebut, "hierarki" artinya "tatanan suci" dari Gereja, Tubuh Kristus, sehingga menghormati keragaman hadiah dan pelayanan yang dibutuhkan untuk penyatuan sejati.

Uskup adalah pimpinan Gereja keuskupan dan merupakan bagian dari hierarki Gereja Katolik setelah Sri Paus. Uskup sering disebut pengganti dari para rasul kristus, pimpinan Sri Paus menjadi bertanggung jawab atas semua gereja katolik. Di dalam Gereja katolik kedudukan Uskup bersifat seumur hidup. Uskup sendiri memiliki tugas : 1. Menyebarkan Injil, 2. Menggembalakan umat Tuhan, 3. Misi Klerus. Dalam misi Klerus, seorang uskup mengemban 3 tugas Kristus yakni sebagai Nabi (mengajar), sebagai Imam (memimpin perayaan Misa), dan sebagai Raja (memimpin umat).(Falendro et al., 2018)

"Lalu sebelum itu, sambal merumuskan itu, kami sambal mengadakan semacam workshop bagi paroki2, untuk mensosialisasikan ptkap itu. Lalu ada tim programasi, tim akt, supaya dibentuk bagaimana mebuat program, menyusun pelaporan keu paroki, itu terus menerus disosialisasikan, bahwa hasilnya akhirnya ,dasarnya mmg keputusan mgr haryo th 2002, memerintahkan supaya semua paroki menerapkan dasarnya psak 45. Dipakai untuk organisasi nirlaba" (Interviewee 6 – Romo Ekonom)

Resisten disetiap melakukan perubahan pasti akan ada, tetapi tidak mereka tetap harus melakukan karena memang pelaporan keuangan ini adalah perintah uskup. Perintah uskup wajib dilaksanakan karena memang Uskup dianggap sebagai tangan kanan Tuhan.

"Perintah uskup itu uskup sebagai hukum perintah itu sebagian besar di tuliskan di kitab kantonik, itu ada yang di sebut buku 8, disana sudah menjadi segala sumber hukum, diluar itu kalau Uskup bicara yang namanya perintah uskup harus di ikuti,paus itu sebagai uskup, sesepuhnya para uskup,, yang di katakan oleh pak antok, perintah uskup itu segala – galanya, sama seperti perintah Tuhan"(Interviewee 5 -- Staff Keuskupan)

Isomorfisma koersif sendiri yang terjadi di dalam paroki – paroki ketika menjalankan pelaporan akuntansi karena adanya tekanan dari uskup. Di mulai dari surat uskup yang dikeluarkan pada tahun 2002.

Isomorfisma koersif tidak hanya dari Uskup yang memberikan keputusan untuk melakukan pelaporan keuangan akuntansi, tetapi juga ada dari pemerintah. Pemerintah mengeluarkan UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam UU tentang yayasan ini menyebutkan bahwa pengurus wajib menyusun laporan tahunan sekurang – kurangnya memuat :

1. Laporan Keuangan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku serta hasil yang telah di capai
2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir perioda, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Inisiasi adalah proses awalan bagaimana pelaporan keuangan bisa terjadi, memperkenalkan awal nya bagaimana pelaporan akuntansi ini bekerja, apa saja yang di butuhkan, pedoman apa saja

yang di perlukan orang – orang yang menjalankan mendapatkan tekanan dari uskup bahwa ini memang harus di jalankan supaya gereja mempunyai pelaporan akuntansi yang kredibel, yang transparan, dan ini juga harus di jalankan supaya gereja mempunyai pertanggung jawaban dengan umat. Pada proses permulaan memperkenalkan pelaporan akuntansi banyak sekali yang tidak setuju, kenapa harus diadakan pelaporan akuntansi berbasis sistem jika yang manual saja sudah cukup, tetapi karena ketaatan secara hirarki gereja itu menuntut mereka mau tidak mau harus patuh membuat laporan keuangan.

> " *Cuma mungkin dlm instruksi itu semangatnya itu bahwa mungkin dari apakah sebaiknya kita harus punya transparansi yg baik, atau ada indikasi perlu ditata, atau mungkin factor pajak, dituntut dari unsur pajak, maka kita harus menertibkan*" (Interviewee 6 -- Romo Ekonom)

Uskup bukan satu – satunya yang memberikan tekanan kepada paroki – paroki, tetapi juga mendapatkan tekanan dari pihak pajak. Dalam pelaporan akuntansi ini pihak pajak juga termasuk sebagai isomorfisma koersif. Tahun 2016 waktu adanya *Tax Amnesty* paroki – paroki dan juga. Keuskupan mulai resah, karena pihak pajak sudah meminta, beberapa gereja juga yang membangun juga harus melaporkan pajak mereka sendiri. Semenjak saat itu momen *Tax Amnesty* ini digunakan oleh paroki dan keuskupan untuk paroki juga memiliki npwp, artinya paroki – paroki sendiri secara tidak langsung mereka juga mendapatkan tekanan untuk membuat pajak.

> “ *Kemudian, kalau mulai amnesty di 2016, KAS resah. Karena mereka sudah mulai sadar pajak, beberapa gereja yang membangun juga harus melapor pajak sendiri. Artinya, ada kesadaran yg didorong dari paksaan aturan pemerintah.” (interviewee 8* -- bendahara paroki)

Pelaporan keuangan paroki sesudah dijalankan mengalami tekanan dari uskup, dan mengalami tekanan dari pihak pajak. Dalam hal ini pihak pajak merupakan salah satu tekanan mengapa paroki harus melakukan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan kepada pajak harus di lakukan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Dalam pendirian tempat – tempat juga membutuhkan pajak, karena jika kita tidak membayar pajak kita tidak bisa mendirikan bangunan. Banyak dari orang – orang yang bekerja di dalam paroki sadar akan pentingnya mereka membuat pelaporan akuntansi yang baik, trasparan, dan kredibel.

- Isomorfisma Normatif

Isomorfisma normatif tidak ditemukan dalam proses perubahan pelaporan keuangan paroki di Keuskupan Agung Semarang, dikarenakan isomorfisma normatif adalah tekanan yang di berikan dari pihak – pihak profesional. Paroki dalam hal ini tidak mempunyai pihak profesional yang memberi tekanan. Jika di lihat seperti perusahaan akan mempunyai tekanan profesional dari Big 4 KAP, sedangkan berbeda dengan paroki.

- Isomorfisma Mimetik

Setelah mengalami tekanan dari awal, banyak dari orang – orang yang melakukan pelaporan akuntansi yang baik ini meniru dari organisasi yang sudah baik untuk memajukan parokinya, hal ini bisa di sebut sebagai isomorfisma mimetik. Bendahara – bendahara paroki juga mengatakan bahwa jika kita membuat pelaporan yang baik dari segi tata kelola dan pelaporan keuangannya maka paroki – paroki lain bisa meniru. Seperti contohnya paroki Katedral dalam penataan tata kelola pelaporan keuanganya sangat baik dan kompleks bisa di tiru oleh paroki lain. Teori isomorfisma memtik sendiri lebih berfokus kepada ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi. Kita bisa melihat bahwa organisasi meminta orang – orang yang bekerja untuk melakukan pelaporan keuangan yang berbasis sistem ini untuk meniru intitusi yang lebih baik, lebih transparan, lebih kredibel.

> *"ketika kemudian kami melihat 2018 sangat semrawut, dan ketika romo butuh data kami tidak bisa, rasa rasanya saya kemudian menjadi tertantang, tertantng untuk yuk dibenahi yuk dijaga, sistem yang sudah di pikirkan oleh KAS seharusnya sangat membantu paroki,"* (Interviewee 12 -- Bendahara Paroki)

Isomorfisma Mimetik sendiri pernah juga di teliti dalam (Irvine, 2008) penelitian yang berjudul "The global institutionalization of financial reporting: The case of the United Arab Emirates ". Penelitian Irvine menjelaskan bahwa kasus Unite Emirat Arab memiliki tekanan isomorfisma mimetik yaitu Mitra dagang dan Perusahaan Multinasional.

4.9. Diskusi dan Analisis

Penelitian mengenai teori isomorfisma sudah pernah di teliti oleh Irvine pada tahun 2008. Irvine dalam penelitiannya menjelaskan bahwa UEA belum menggunakan IFRS dan itu mendapatkan tekanan dari beberapa pihak. Teori Isomorfisma menjelaskan bahwa ada Isomorfisma Koersif, Isomorfisma Normatif, dan isomorfisma mimetik. Dalam peneliti UEA tekanan dari atasannya adalah Bank Dunia dan Pasar Modal. Isomorfisma Normatif ada tekanan dari Big 4 KAP, dan yang terakhir ada Isomorfisma Mimetik yaitu mitra dagang dan perusahaan multinasional.

Institusional isomorfisma yang dijadikan teori oleh peneliti juga memiliki beberapa tekanan yaitu isomorfisma koersif, dan isomorfisma mimetik. Pada awalnya Keuskupan memberi perintah kepada semua paroki – paroki untuk membuat laporan keuangan dikarenakan mereka ingin paroki – paroki juga memiliki pelaporan keuangan. Yang sesuai dengan *Good Church Governance* di dalamnya seperti adanya pelaporan keuangan yang transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Selain dari Keuskupan ingin menjadikan bahwa paroki – paroki berbasis *Good Church Governance*, paroki juga ingin menjaga aset gereja supaya tetap aman dan tidak di salah gunakan maka dari itu dibuatlah pelaporan akuntansi. dari sisi pajak juga membutuhkan pelaporan akuntansi yang berbasis sistem supaya tidak repot ketika gereja ingin membangun. Seiring berjalannya waktu ketika adanya tekanan dari Uskup dan tekanan dari pihak pajak (Isomorfisma koersif) dalam proses berjalannya setiap orang yang

mengerjakan akhirnya ingin juga memajukan paroki nya masing masing (Isomorfisma Mimetik). Penelitian mengenai teori Institusional isomorfisma ini sudah pernah di lakukan oleh (Irvine, 2008)(Darono et al., 2013).